

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dapat dimaknai sebagai proses berkesinambungan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pembangunan ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas ekonomi suatu wilayah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Todaro & Smith, 2006). Pembangunan ekonomi bertujuan agar output yang dihasilkan dapat memberikan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat, bukan hanya terkonsentrasi pada daerah tertentu saja (Rachbini, 2001). Tidak dapat dipungkiri, pertumbuhan ekonomi merupakan elemen yang tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi dan sering dijadikan acuan utama untuk menilai sejauh mana pembangunan berhasil dicapai (Todaro & Smith, 2015).

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu sejalan dengan tercapainya pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah. Wilayah dengan pertumbuhan ekonomi pesat, seperti kawasan perkotaan atau industri besar dapat menikmati hasil pertumbuhan ekonomi, sementara wilayah lainnya yang lebih terpencil tertinggal (Adisasmita, 2013). Kondisi ini terjadi karena perhatian pemerintah lebih terpusat pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tanpa memperhatikan dampak negatif yang timbul, seperti tidak meratanya hasil pembangunan (Azim et al., 2022).

Permasalahan pembangunan ekonomi yang sering kali terjadi adalah disparitas ekonomi antar wilayah. Disparitas ekonomi antarwilayah mengacu pada ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi, distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan dasar antar wilayah dalam suatu negara (Zasriati, 2022).

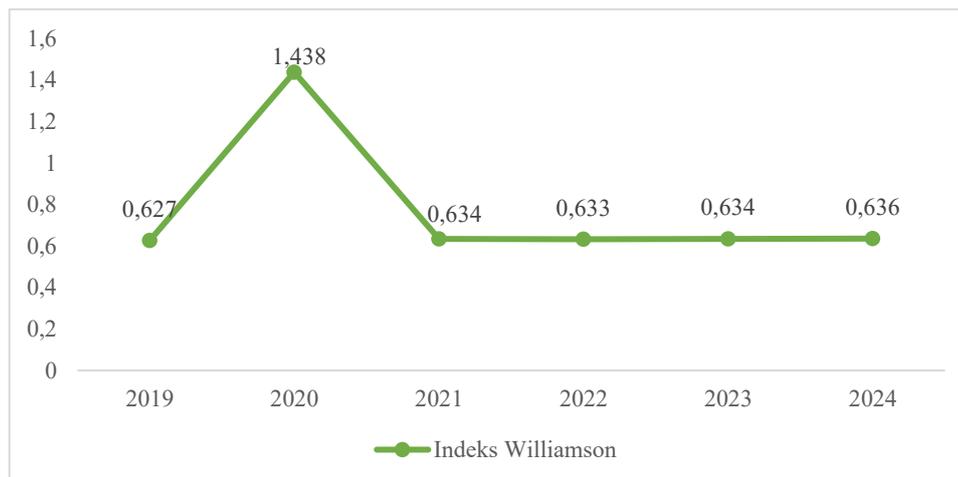
Disparitas ini menggambarkan lemahnya perencanaan pembangunan yang inklusif dan adil. Disparitas ekonomi yang tinggi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya terpusat di wilayah – wilayah tertentu. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi nasional menjadi timpang serta menciptakan jurang kesejahteraan yang semakin lebar antar kelompok (Panggarti et al., 2022).

Berdasarkan laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) *Regional Outlook 2023*, disparitas ekonomi antarwilayah secara global menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Disparitas ekonomi antarwilayah meningkat di banyak negara maju dan berkembang. Di banyak negara OECD, 20% wilayah dengan PDB per kapita terendah belum mampu mengejar ketertinggalan, bahkan mengalami stagnasi atau penurunan dalam produktivitas dan partisipasi tenaga kerja. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa lebih dari 50% negara anggota OECD mengalami peningkatan kesenjangan antarwilayah selama dua dekade terakhir. Disparitas ini tampak jelas dari perbedaan tajam dalam PDB per kapita antarwilayah, di mana wilayah metropolitan mencatat PDB per kapita yang rata-rata 33% lebih tinggi dibanding wilayah non-metropolitan.

Indonesia merupakan negara berkembang yang kaya akan potensi alam di seluruh wilayah Indondonesia. Namun Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengatasi disparitas ekonomi serta mewujudkan pemerataan pembangunan (Raharti et al., 2021) Tidak semua daerah yang ada di Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara optimal untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Nurrohim et al., 2024). Kondisi ini menjadikan disparitas antarwilayah sebagai isu strategis yang mendesak untuk ditangani dalam agenda perencanaan pembangunan. Disparitas tersebut tercermin

melalui berbagai indikator seperti perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat, infrastruktur dasar, hingga kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antarwilayah, baik antarprovinsi maupun antarkabupaten/kota.

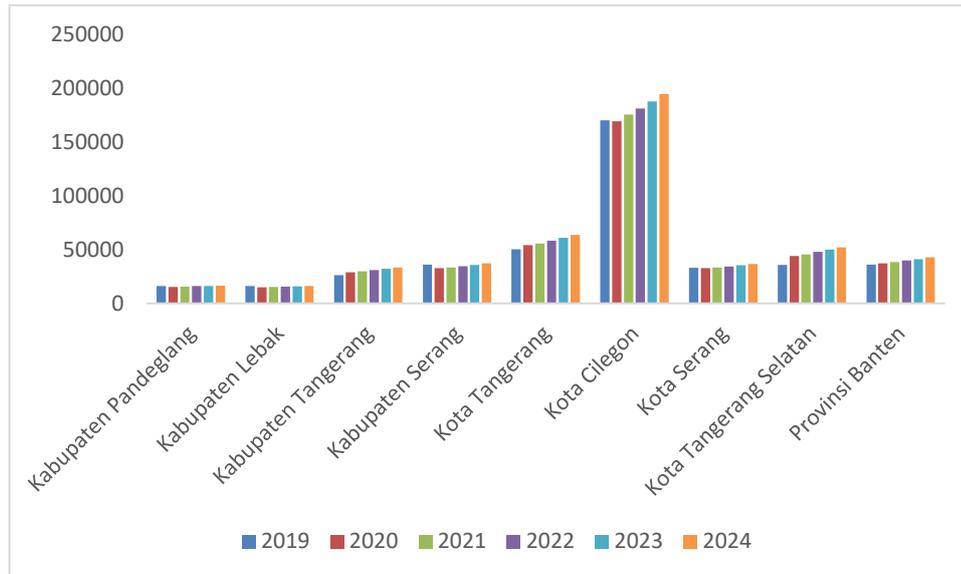
Salah satu provinsi yang menghadapi fenomena ini adalah Provinsi Banten, yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Dengan keunggulan letak geografis yang strategis mampu mendorong konektivitas ekonomi. Tingginya aktivitas ekonomi serta meningkatnya daya beli masyarakat turut memperkuat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Namun pertumbuhan ekonomi yang pesat tersebut cenderung terpusat di wilayah – wilayah tertentu. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan pertumbuhan atau *imbalance growth* yang berujung pada disparitas ekonomi antarwilayah (Waluya et al., 2024). Selain dilihat berdasarkan besar kecilnya PDRB perkapita masing-masing Kabupaten/Kota, untuk mengukur tingkat disparitas yang terjadi dapat menggunakan Indeks Williamson (Lestari & Robertus, 2023). Indeks Williamson adalah suatu indikator statistik yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau output ekonomi antarwilayah dalam satu provinsi atau negara. Indeks ini dikembangkan oleh Jeffrey G. Williamson, dan dihitung berdasarkan variasi PDRB per kapita antarwilayah dengan memperhitungkan jumlah penduduk sebagai pembobot (Sjafrizal, 2018).



Gambar 1.1 Indeks Williamson Provinsi Banten

Sumber: Diolah Dari Data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Disparitas yang terjadi di Provinsi Banten tergolong cukup tinggi. Hal ini terlihat dari hasil analisis menggunakan Indeks Williamson. Selama periode 2019 hingga 2024, nilai Indeks Williamson di Provinsi Banten secara konsisten berada di atas angka 0,6 yang mendekati nilai maksimum 1. Bahkan, pada tahun 2020 terjadi lonjakan yang tinggi ke angka 1,438, yang menunjukkan disparitas yang sangat tinggi antarwilayah di Provinsi Banten. Lonjakan ini kemungkinan besar terjadi akibat dampak pandemi COVID-19. Setelah tahun 2020, nilai indeks williamson kembali menurun dan stabil di kisaran 0,633–0,636 selama periode 2021–2024. Meskipun menunjukkan penurunan dari tahun 2020, nilai tersebut masih menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi di Provinsi Banten tergolong tinggi dan belum menunjukkan penurunan signifikan secara berkelanjutan. Stabilitasnya indeks ini dapat mencerminkan bahwa kebijakan pemerataan belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi kesenjangan antar kabupaten/kota di provinsi tersebut.



Gambar 1. 2 PDRB Perkapita ADHK Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Ribu Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan tahun 2019–2024, terlihat bahwa Provinsi Banten mengalami tren pertumbuhan ekonomi yang stabil dan positif setiap tahunnya. PDRB per kapita meningkat dari Rp35.913,9 pada tahun 2019 menjadi Rp42.773,59 pada tahun 2024. Namun, pertumbuhan ini tidak merata antar wilayah, yang terlihat dari perbedaan nilai PDRB per kapita yang cukup tajam antar kabupaten/kota. Kota Cilegon memiliki nilai PDRB per kapita tertinggi secara konsisten, mencapai Rp194.523,28 pada tahun 2024, jauh di atas rata-rata provinsi. Di sisi lain, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak terus menunjukkan nilai PDRB per kapita yang jauh lebih rendah, masing-masing hanya sebesar Rp16.538 dan Rp16.131,08 pada tahun 2024.

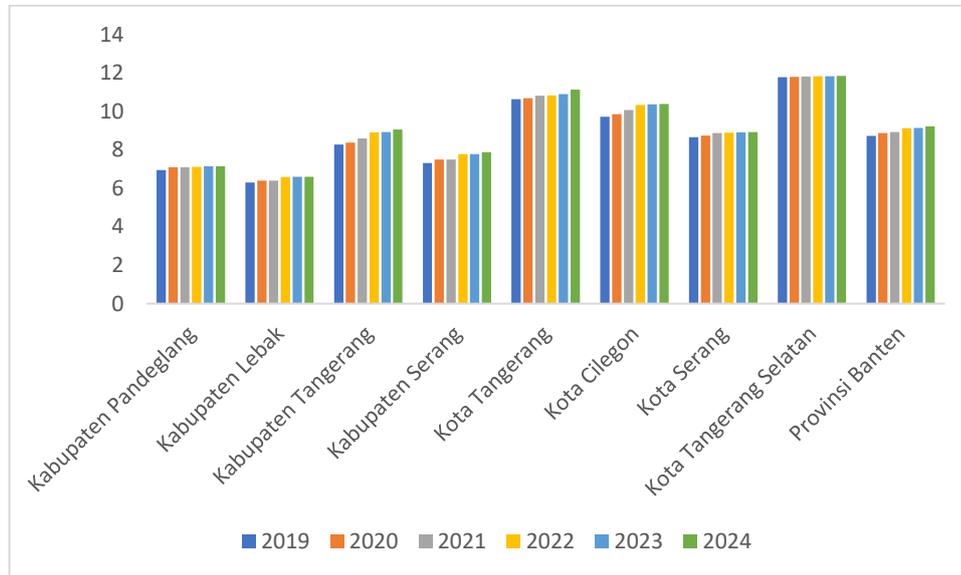
Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata tersebut sejalan dengan pandangan dalam Teori Kausasi Kumulatif oleh Gunnar Myrdal, yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi cenderung menghasilkan efek arus balik (backwash

effect) yang memperkuat wilayah maju dan melemahkan wilayah tertinggal. Wilayah yang telah berkembang akan semakin menarik modal, tenaga kerja, dan investasi, sedangkan daerah tertinggal akan kehilangan daya saing dan sumber daya produktifnya (Hasan & Azis, 2018). Dalam konteks Provinsi Banten, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah utara tidak secara otomatis menurunkan tingkat ketimpangan, melainkan justru memperlebar jurang kesejahteraan antarwilayah.

Fakta ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten belum sepenuhnya inklusif dan masih terkonsentrasi di wilayah tertentu. Cilegon dan Tangerang Raya lebih maju dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Keunggulan letak geografis Kota Cilegon yang berdekatan dengan Pelabuhan Merak dan Kota Tangerang yang berdekatan dengan DKI Jakarta mampu memberikan prioritas lebih dalam pembangunan infrastruktur, seperti transportasi dan fasilitas umum, yang menarik investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Berbeda halnya dengan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yang terletak lebih jauh dari pusat ibu kota provinsi sehingga menerima prioritas pembangunan infrastruktur yang lebih rendah yang mengakibatkan perkembangannya tidak secepat Tangerang Raya dan Cilegon (Noviar, 2021).

Dalam hal ini pemerintah hanya memfokuskan pada daerah yang memiliki keunggulan letak geografis dan potensi ekonomi yang lebih besar. Sedangkan potensi ekonomi pada daerah yang lain belum dioptimalkan (Hababil et al., 2024). Oleh sebab itu, analisis terhadap berbagai faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi ketimpangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Banten menjadi hal yang krusial. Studi ini selanjutnya akan menelaah peran pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, serta dana alokasi umum dalam

menciptakan perbedaan ekonomi antar daerah. Dengan memahami akar penyebab disparitas ekonomi, langkah konkret dapat diambil untuk mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.



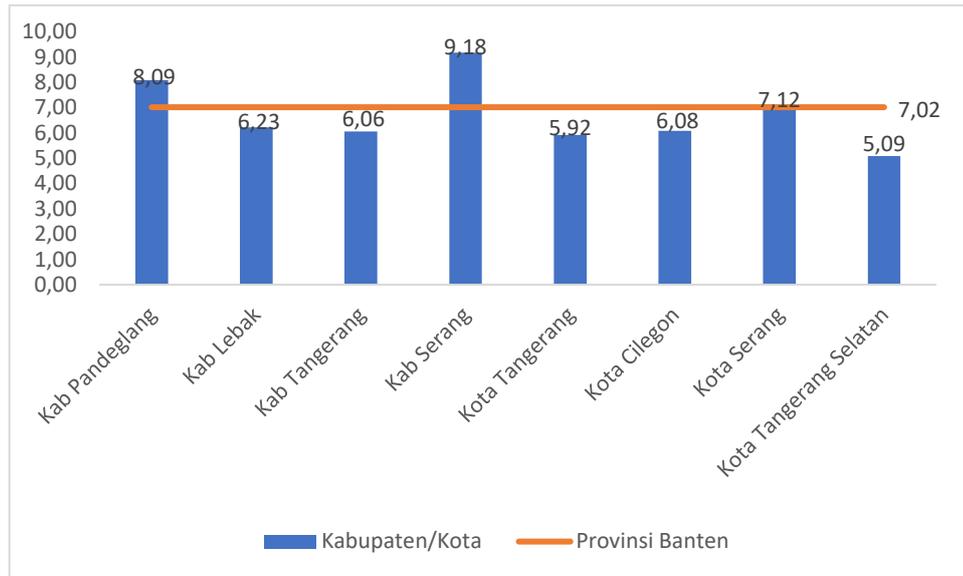
Gambar 1.3 Rata – Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2019 – 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Selain pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia juga memiliki kontribusi dalam menciptakan disparitas wilayah, terutama dalam aspek pendidikan. Berdasarkan pada gambar 1.3 Provinsi Banten mencatat rata-rata lama sekolah mencapai 8,74 dan 9,23 pada tahun 2019 dan 2024. Namun terlihat adanya ketimpangan tingkat pendidikan antarwilayah yang cukup mencolok. Wilayah-wilayah perkotaan dan maju seperti Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon mencatat rata-rata lama sekolah yang tinggi, dengan angka di atas 10 tahun sejak tahun 2019, bahkan mencapai 11,86 tahun di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024. Sementara itu, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak mencatat rata-rata lama sekolah jauh lebih rendah, berkisar antara 6,96 hingga 7,16 tahun selama periode tersebut. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa penduduk di

Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak rata-rata hanya menempuh pendidikan hingga tingkat sekolah dasar atau setara SMP, sedangkan di wilayah perkotaan banyak penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan hingga SMA atau bahkan lebih.

Perbedaan tingkat pendidikan ini mencerminkan ketimpangan mutu sumber daya manusia yang turut berpengaruh pada tingkat produktivitas tenaga kerja, daya saing daerah, serta kemampuan wilayah untuk menyerap dan mengembangkan aktivitas ekonomi (Ningrum et al., 2024). Berdasarkan teori modal manusia, pendidikan menjadi elemen kunci yang berperan penting dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan (Wahed et al., 2021). Daerah yang memiliki tingkat pendidikan lebih baik, umumnya melahirkan sumber daya manusia yang lebih kompeten dan berorientasi pada sektor ekonomi modern yang pada akhirnya memperkuat ekonomi daerah. Di sisi lain, daerah berpendidikan rendah cenderung kurang kompetitif dalam produktivitas, berpenghasilan lebih rendah dan memiliki akses terhadap kesempatan kerja. Akibatnya, perbedaan kemampuan tenaga kerja antarwilayah menghasilkan perbedaan pendapatan, tingkat kesejahteraan, dan laju pertumbuhan yang tidak seimbang.



Gambar 1. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024

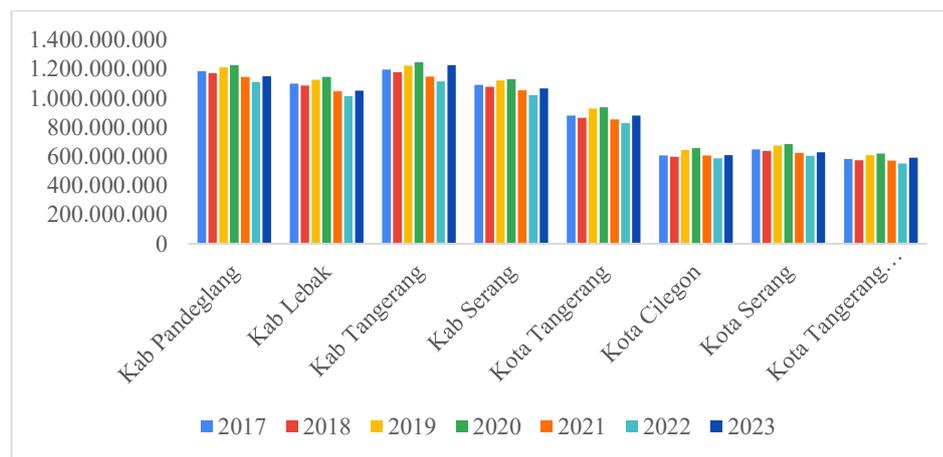
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Pada gambar 1.4 tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten tergolong cukup tinggi yaitu 7,02%. Penyumbang tingkat pengangguran Provinsi Banten tertinggi diraih oleh Kabupaten Serang yakni 9,18% kemudian Kabupaten Pandeglang yakni 8,09% Sedangkan tingkat pengangguran terbuka Kota Tangerang Selatan paling rendah diantara kabupaten/kota di Banten, yakni 5,09% dan Kota Tangerang sebesar 5,92% Sebagian besar peluang kerja terkonsentrasi di daerah perkotaan dengan sektor industri, sementara wilayah lainnya masih bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata yang memiliki kapasitas terbatas dalam menyerap tenaga kerja dalam skala besar.

Di daerah dengan tingkat pengangguran tinggi, produktivitas ekonomi menjadi rendah karena sebagian besar tenaga kerja tidak terlibat dalam kegiatan produktif. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut melambat dibandingkan wilayah yang menunjukkan angka pengangguran rendah dan aktivitas ekonomi yang lebih aktif (Jubaedah & Amelia, 2021). Selain itu,

pengangguran yang tinggi juga berdampak pada berkurangnya kontribusi daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga memperlebar jurang antara wilayah maju dan tertinggal.

Dalam hal ini keadaan sosial ekonomi Provinsi Banten tergolong masih memerlukan campur tangan pemerintah. Otonomi daerah memberikan hak dan wewenang yang besar kepada pemerintah daerah, sehingga mereka dapat lebih fleksibel dalam merencanakan pembangunan sesuai dengan keadaan, potensi serta kebutuhan masyarakat yang ada (Sidik et al., 2020). Akan tetapi, tiap daerah memiliki kapasitas fiskal yang tidak sama. Untuk itu, pemerintah pusat memberikan pendanaan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang dananya diambil dari APBN (Safitri & Asmara, 2023). DAU sebagai salah satu strategi pendanaan dari pemerintah pusat yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan kemampuan fiskal antar daerah. Sehingga DAU yang disalurkan setiap daerah berbeda, disesuaikan dengan keadaan ekonomi daerah dan kebutuhan fiskal (Amami & Asmara, 2022).



Gambar 1. 5 Dana Alokasi Umum Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017 - 2023

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Berdasarkan gambar 1.5. Dana Alokasi Umum Provinsi Banten selama periode 2017 hingga 2023 terlihat adanya tren yang fluktuatif diberbagai kabupaten dan kota. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2020 yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat dalam merespons dampak pandemi COVID-19. Pada periode 2017 – 2023 DAU yang diterima Kabupaten Tangerang relatif lebih tinggi, terutama pada tahun 2020 yakni Rp 1.245.969.973. Sedangkan Kota Cilegon relatif lebih rendah, terutama pada tahun 2022 yakni Rp 552.258.319. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kapasitas dan kebutuhan fiskal antar daerah, yang menjadi penting untuk dianalisis dalam pemerataan pembangunan.

Dalam praktiknya, distribusi DAU sering kali belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan potensi ekonomi daerah secara adil. Beberapa daerah yang sudah relatif maju tetap menerima alokasi yang besar, sementara daerah tertinggal justru tidak mendapatkan proporsi yang cukup untuk mengejar ketertinggalannya. Ketidaktepatan dalam pengalokasian ini membuat daerah dengan kapasitas fiskal rendah sulit memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, atau menciptakan lapangan kerja yang layak (Alfurqani et al., 2021).

Berdasarkan penelitian lain yang dilakukan oleh (Sinik & Robertus, 2023) terkait ketimpangan ekonomi antarwilayah di Provinsi Banten selama periode 2005-2021, penelitian tersebut menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, pengangguran, investasi dan dana alokasi umum (DAU). Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah yang berarti peningkatan pertumbuhan ekonomi cenderung menurunkan ketimpangan. Pengangguran

berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah sehingga pengangguran dapat meningkatkan ketimpangan. Investasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah, sehingga investasi yang meningkat dapat menurunkan ketimpangan. Sedangkan DAU tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Banten.

Selain itu, penelitian oleh (Zusanti et al., 2020) dengan variabel Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa. Dalam penelitian ini, indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif, sehingga dengan meningkatnya angka indeks ini dapat menurunkan tingkat ketimpangan. Namun pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan dan tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan, sehingga tingkat pengangguran yang tinggi dapat menaikkan tingkat ketimpangan.

Berdasarkan penjelasan permasalahan dan fenomena di atas, pertumbuhan ekonomi yang cukup baik ternyata belum mencerminkan pemerataan pembangunan ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya angka pengangguran serta distribusi Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak merata antarwilayah turut berkontribusi terhadap disparitas ekonomi di Provinsi Banten. Kajian lebih lanjut diperlukan dengan menetapkan serta mengimplementasikan kebijakan yang tepat guna mengurangi tingkat disparitas ekonomi antarwilayah. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk mengkaji permasalahan ini melalui penelitian yang berjudul “Analisis, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Dana Alokasi Umum Terhadap Disparitas Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten”

1.2 Rumusan Masalah

Perekonomian Provinsi Banten tergolong cukup baik. Meskipun pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten tergolong cukup baik, namun pembangunan ekonomi yang terjadi belum merata. Hal ini menyebabkan Provinsi Banten mengalami disparitas ekonomi Kabupaten/Kota yang tinggi. Berdasarkan uraian di atas, rumusan permasalahan dalam studi ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap disparitas ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten ?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Tingkat Pendidikan terhadap disparitas ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten ?
3. Apakah terdapat pengaruh antara Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap disparitas ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten ?
4. Apakah terdapat pengaruh antara Dana Alokasi Umum terhadap disparitas ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten ?

1.3 Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah yang telah disampaikan, berikut merupakan tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap disparitas ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
2. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap disparitas ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
3. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap disparitas ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

4. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap disparitas ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

1.4 Ruang Lingkup

Berdasar pada cakupan permasalahan yang luas, maka penelitian ini memiliki batasan yang diteliti agar pembahasan tetap terfokus, diantaranya :

1. Data *time series* yang digunakan tahun 2010 hingga 2024 yang berasal dari Provinsi Banten pada penelitian ini.
2. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu disparitas ekonomi yang diukur dengan indeks williamson, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Dana Alokasi Umum

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beragam manfaat atau kegunaan, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain mengenai disparitas ekonomi antarwilayah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih efektif untuk mengurangi disparitas antarwilayah.